

**IMPLEMENTASI PROGRAM GASPOL 12 TAHUN (GERAKAN AYO SEKOLAH
POL 12 TAHUN) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG**

17/5/24

Inka Putri Rahmasari, R. Slamet Santoso, Kismartini

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang, Semarang

Telepon (024) 7465407 Faksimilie (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

This research aims analyze the implementation of the 12-Year GASPOL Program (Gerakan Ayo Sekolah Pol 12 Tahun) as well as the elements that support or hinder its implementation. This research is a qualitative descriptive study. The research results show that the implementation of the 12 year GASPOL program is still not optimal because there are still targets who are reluctant to return to school. The driving factors for implementing the 12 Year GASPOL program are the commitment of political leadership and time and changing interests. The inhibiting factors in program implementation are the increasing number of players/actors, the more complex they are, the existence of multiple loyalties, the complexity inherent in the program, namely the lack of supporting facilities, the absence of SOPs in its implementation. It can be concluded that the implementation of the 12 Year GASPOL Program in Rembang Regency as a whole has gone well, but several inhibiting factors have caused the implementation of the program to be less than optimal. Suggestions from researchers are creating special SOPs, carrying out routine coordination with other actors, providing appropriate incentives for implementers, adding supporting infrastructure such as inclusive schools, as well as further monitoring of targets that have been intervened in accordance with target identification.

Keyword: Implementation, Public Policy, 12 Years GASPOL Program

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, dan negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan memberikan akses terhadap terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia. Pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing di era keterbukaan dan globalisasi. Pemerintah memimpin gerakan nasional untuk mewajibkan pendidikan dan memberantas buta huruf. Upaya ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan.

Berdasarkan hasil survei pendidikan menengah global tahun 2018 yang dilakukan oleh PISA (Program for International Student Assessment) pada tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat rendah yaitu pada peringkat 74 dari 79 negara yang disurvei. Dengan kata lain, Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbawah dibandingkan negara lain (Susiani, 2021).

Data tahun 2022: 22,56% penduduk Indonesia tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, 29,97% tamat sekolah menengah atas atau sederajat, hanya 10,15% yang tamat pendidikan tinggi, dan sisanya 37,32% tamat sekolah dasar atau sederajat. Pada tahun 2022, rata-rata lama bersekolah penduduk usia 15 tahun ke atas tetap sebesar 9,08 tahun atau setara dengan tahun ketiga sekolah menengah pertama (BPS, 2023)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah secara jelas dan nyata mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah jelas dijabarkan ketentuan prioritas pelayanan minimal di mana urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berkomitmen

untuk terus meningkatkan capaian SPM bidang pendidikan demi memastikan setiap warga negara menerima pelayanan SPM sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah merupakan gerakan bersama untuk mengembalikan anak tidak sekolah kembali ke jenjang pendidikan sampai menyelesaikan pendidikan menengah atau sederajat. Tujuan adanya program ini yang tertuang dalam peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah salah satunya adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Data Anak Tidak Sekolah yang Tertangani 2023

Kecamatan	Jumlah ATS	ATS Kembali ke Sekolah	Keterangan
Sumber	47	11	
Bulu	0	0	Ditelusuri Tahun 2024

Gunem	0	0	Ditelusuri Tahun 2024
Sale	0	0	Ditelusuri Tahun 2024
Sarang	260	111	
Sedan	136	18	
Pamotan	106	12	
Sulang	110	54	
Kaliori	0	0	Ditelusuri Tahun 2024
Rembang	112	48	
Pancur	83	25	
Kragan	155	19	
Sluke	220	88	
Lasem	108	31	
Kabupaten Rembang	1337	417	

Sumber: Data Dinas Pendidikan

Data yang ATS yang terhimpun sampai tahun 2023 dari Dinas Pendidikan sebanyak 1.337 anak tidak sekolah (ATS). Namun, mereka yang berhasil kembali ke sekolah sekolah baru 417 anak atau sekitar 31% yang belum maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ditemukan maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah POL 12 Tahun) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Rembang?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah POL 12 Tahun) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah POL 12 Tahun) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Rembang
2. Menganalisis faktor penghambat Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah POL 12 Tahun) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Rembang

KAJIAN TEORI

Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dapat didefinisikan sebagai melayani atau memenuhi (dalam Anggara, 2016:13). Administrasi merupakan suatu upaya secara menyeluruh terhadap segala aktivitas yang berjalan di dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi tersebut (*goals and objectives*). Publik merupakan beberapa orang yang sama dalam hal berpikir, menyalurkan persaannya, harapan, sikap, dan tindakan sesuai dengan norma yang berlaku (Pasolong, 2014:6)

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan beberapa opsi yang berhubungan dan ditentukan oleh suatu organisasi atau pemerintah di bidang-bidang yang telah ditetapkan dan menjadi tugas pemerintah, seperti kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain-lain Willy N. Dunn (1994)

Implementasi kebijakan

Menurut Riant Nugroho (2011:618) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemenasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk

program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut Implementasi Program GASPOL 12 tahun ini dapat diamati dengan indikator menurut Riant Nugroho (2014: 686) mengemukakan bahwa keefektifan pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat melalui “lima tepat” yaitu

1. Ketepatan Kebijakan,

Ketepatan kebijakan adalah kebijakan yang telah di buat memuat hal-hal yang memang harus dipecahkan. Suatu kebijakan dirasa tepat jika tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dan hasilnya dapat menyelesaikan masalah yang ada, dalam Riant Nugroho (2014: 686).

2. Ketepatan Pelaksanaan,

Ketepatan pelaksana adalah aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Aktor dalam implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah melainkan terdapat lembaga lain yang dapat menjadi pelaksana, dalam Riant Nugroho (2014: 686).

3. Ketepatan Target,

Ketepatan target adalah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari target kebijakan, dalam Riant Nugroho (2014: 687). Indikator dalam ketepatan ini adalah ketepatan target penerima, target dalam kondisi siap untuk

di intervensi, dan intervensi target dalam implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan,

Ketepatan lingkungan adalah kebijakan yang telah dibuat telah sesuai dengan lingkungan kebijakan, seperti interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait, dalam Riant Nugroho (2014: 687). Indikator dalam ketepatan ini adalah keterkaitan lembaga- Lembaga pelaksana kebijakan dengan Lembaga lainnya, persepsi kelompok kepentingan akan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan sumber otoritas kebijakan

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses adalah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan proses di dalam implementasi kebijakan publik sehingga pelaksana kebijakan memahami tugas dan kelompok sasaran menerima dari kebijakan tersebut, dalam Riant Nugroho (2014: 688). Indikator dalam ketepatan ini adalah kesiapan pelaksana dalam menjalankan kebijakan dan kesiapan masyarakat dalam menjalankan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini,

lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kabupaten Rembang dan situs penelitian yang digunakan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. Jenis data yaitu data kualitatif yang berasal dari wawancara dengan informan, pengamatan langsung berupa foto dan dokumentasi berupa literature jurnal terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program GASPOL 12 Tahun dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Rembang

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan adalah kebijakan yang telah dibuat dapat memuat hal-hal yang harus dipecahkan. Suatu kebijakan dirasa tepat apabila tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dan hasilnya dapat menyelesaikan masalah.

Tujuan dari adanya program ini adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Kelompok umur sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur(%)		
	2021	2022	2023
7-12	99,06	99,98	99,99
13-15	98,05	99,07	98,62
16-18	68,97	68,55	70,59

Sumber: BPS Kabupaten Rembang 2023

Dari tabel diatas menunjukkan beberapa peningkatan angka partisipasi sekolah meskipun pada tahun 2023 khususnya kelompok usia 13-15 tahun mengalami penurunan tetapi selain itu angka menunjukkan kenaikan mekipun pada kelompok usia 16-18 masih belum tinggi.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Terdapat 2 sub gejala yang digunakan dalam mengkaji implementasi Porgram GASPOL 12 tahun dalam gejala tepat pelaksanaan, yaitu:

1. Aktor implementasi program

Berdasarkan wawancara diatas ketiga narasumber menyatakan terdapat banyak aktor yang terlibat dalam implementasi program GASPOL 12 Tahun ini, yang masing masing memiliki perannya.ketiganya sepakat bahwa program ini tidak dapat dilaksanakan sendirian oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku *leading sector* keberjalanan program ini saja tetapi juga adanya keterlibatan aktor dari OPD atau lembaga lainnya.

2. Pengaruh pelaksana lembaga lain terhadap kebijakan

Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan menyatakan adanya keterlibatan dari pihak lainnya yaitu dari PKBM dan Forum Anak Beasiswa Rembang yang ikut bekerjasama dalam mengimplementasikan

Program GASPOL 12 tahun ini. Dalam pembahasan tentang kebijakan publik khususnya pada ketepatan pelaksanaan, Aktor mempunyai posisi yang amat strategis. Interaksi Aktor dan kelembagaan inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas (Pritasari & Kusumasari, 2019).

Pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses kebijakan publik, yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi di dalam konteks kebijakan publik (Madani, 2011). Sejalan dengan teori tersebut dalam hal ini aktor kebijakan yang terkait dengan Implementasi Program GASPOL 12 Tahun di Kabupaten Rembang harus sesuai dengan pembagaaian tugas serta dalam hal ini aktor harus terlibat dengan hal tersebut.

Kedua gejala dari tepat pelaksanaan Implementasi Program GASPOL 12 Tahun di Kabupaten Rembang berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pelibatan OPD dan lembaga lain sesuai dengan perannya masing masing, tetapi mengalami kekurangan orang dalam pelaksanaannya terutama pada tahap

rekonfirmasi program, karna dari Dinas Pendidikan karna hanya ada 4 orang yang harus mengontrol seluruh kabupaten Rembang.

3. Ketepatan Target

Program GASPOL 12 Tahun ini sesuai dengan Perbup Nomor 20 Tahun 2023 Bab IV adalah a) belum pernah sekolah, b) anak putus sekolah, c) anak lulus tidak lanjut sekolah. Penentuan target sasaran oleh pemerintah kabupaten tersebut menjadi dasar pada persyaratan untuk dapat menerima program GASPOL 12 Tahun di kabupaten Rembang.

Ketepatan target dalam hal ini masih kurang optimal dikarenakan masih terdapat beberapa anak usia sekolah yang harusnya masuk terdata dan memperoleh program tersebut belum terdata. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa memang terdapat sosialisasi di masing masing kecamatan tetapi dari sosialisasi adanya program ini masih sedikit yang datang hal itu menyebabkan masih kurang menyebarnya program ini selain itu juga papan reklame sosialisasi hanya terdapat di satu tempat di kabupaten Rembang lebih tepatnya terletak di kecamatan Lasem yang mana dari kecamatan lainnya masih kurang tau dengan adanya program

4. Ketepatan Lingkungan

Setiap implementasi kebijakan sangat dibutuhkan kerja sama dan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut baik secara internal maupun secara eksternal untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan dalam suatu program. Keterkaitan antar lembaga pelaksana dengan lembaga lain melalui hubungan koordinasi yang sudah berjalan dengan baik. Menjalankan program bisa dilihat dari bagaimana partisipasi atau seberapa aktif dalam peran Lembaga untuk bisa berkoordinasi satu sama lainnya. Ketepatan Lingkungan berdasarkan hasil observasi, wawancara diatas menunjukkan bahwa sudah terpenuhi namun masih belum optimal pada khususnya pada rapat koordinasi dengan dinas lainnya yang masih kurang dan koordinasi yang dilakukan hanya dari satu arah yaitu Dinas Pendidikan sebagai koordinator dengan dinas lainnya.

5. Ketepatan Proses

Kesiapan pelaksana dalam mengimplementasikan program disini masih belum optimal utamanya pada perangkat desa yang tergolong ber usia dan gaptek karna dalam menginput data menggunakan system yang membutuhkan pengetahuan teknologi.

Selain dari pihak implementator kesiapan dari sasaran program juga masih

belum maksimal, hal tersebut dikarenakan sasaran program yang seharusnya menerimanya menolak tawaran kembali kesekolah dengan berbagai alasan, diantaranya dari alasan sudah bekerja, sudah menikah dan mempunyai anak, dibully dan lain sebagainya.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

1. Banyaknya Aktor yang terlibat

Banyak aktor yang terlibat selain menjadi sebuah kerjasama tetapi juga menjadi sebuah hambatan apabila dalam korrinasinya tidak baik, semakin banyak yang tertlibat maka semakin kompleks juga pemikirannya. Masih adanya miskomunikasi juga dinyatakan oleh sekretaris Tim GASPOL 12 tahun, kurangnya koordinasi yang dilakukan bersama secara rutin agar masing masing OPD mengetahui perkembangan rogram ini dari OPD lainnya yang terkait.

2. Komitmen dan Loyalitas ganda

Kurangnya rapat koordinasi antar OPD juga menyangkut dengan adanya keterbatasan anggaran untuk program yang mana anggaran hanya digunakan untuk pemberian dana bantuan ke siswa kurang mampu yang mau kembali kesekolah, hal itu menjadikan kerja dari dinas lainnya

kurang, masih kurangnya komitmen dari pelaksana implementasi karena adanya hambatan lainnya yaitu tidak adanya insentif dan masing masing aktor yang terlibat bukan hanya mengurus masalah program ini saja tetapi banyak yang menjabat di bidangnya masing masing.

3. Kerumitan yang melekat pada program

Fasilitas pendukung yang masih belum sempurna, misalnya sekolah inklusi yang masih kurang, padahal Anak Tidak Sekolah juga banyak yang disabilitas yang mau kembali kesekolah tapi terhalang dengan minimnya sekolah inklusi di Rembang

4. Kemampuan Organisasi

Tidak adanya *Standart Oprasional Prosedur* SOP dalam mengimplementasikan program dan hanya berlandaskan oleh perbup No 20 Tahun 2023. Berdasarkan tanggapan dari narasumber yang menyatakan bahwa tanpa SOP implementasi masih bisa berjalan dengan pedoman Perbup saja menjadi kurang rinci sistematis dan terstruktur. Perbup tersebut tidak memuat hal hal yang bersifat rinci yang tidak berlaku oprasional dan tidak seteknis dengan adanya SOP.

Tidak adanya SOP dalam implementasi menjadikan tidak adanya aturan yang seragam yang hanya mengandalkan

implementasi sesuai dengan Perbup. Meskipun aturan implementasi sesuai dengan Perbup namun ada beberapa hal yang tidak ada di dalamnya yang lebih teknis oprasionalnya seperti penjelasan terkait koordinasi rutin yang dilakukan, tugas dari masing masing OPD, *timeline* program.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti maka dapat ditarik kesimpulan dalam implementasi Program GASPOL 12 Tahun masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari peningkatan angka partisipasi sekolah yang belum signifikan, masih belum adanya koordinasi rutin, kurangnya informasi mengenai program ini, kesiapan pelaksana dan sasaran masih kurang. Secara umum jika dilihat dari faktor yang terkait, ada beberapa faktor yang menjadi faktor penghambat yaitu terlalu banyak aktor yang terlibat tetapi masih kurangnya koordinasi antar aktor, tidak adanya insentif bagi implemnetator ditambah memiliki loyalitas ganda, kurangnya fasilitas pendukung impkeentasi program seperti sekolah inklusi dan tenaga pendidik khusus, serta masih belum ada SOP terkait implementasi program

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti memberikan saran Implementasi Program GASPOL 12 Tahun dan faktor penghambat implementasi program sebagai berikut:

Untuk meningkatkan ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, ketepatan proses dalam Implementasi Program GASPOL 12 Tahun di Kabupaten Rembang maka peneliti memberikan saran:

1. Ketepatan Kebijakan,

Adanya program harus melalui sosialisasi secara menyeluruh, bukan hanya bagi target sasaran tetapi juga bagi pelaksana kebijakan terutamanya dalam memahami isi kebijakan tersebut.

2. Ketepatan pelaksana

Karna masih kurangnya personil dari OPD pelaksana yaitu Dinas Pendidikan maka dapat melakukan penambahan anggota pelaksana dari Dinas Pendidikan yang memahami tentang program yang dapat dilibatkan seperti pegawai pkl dan anak magang.

3. Ketepatan target

Pemberian loklatih lanjutan bagi petugas yang masih belum mahir dalam mengoprasionalisasikan SIPBM agar tidak terjadi salah input data atau menugaskan tugas tersebut kepada yang memahami

teknologi. Karna masih ada target sasaran yang belum terdata karna kurangnya informasi maka dapat Dinas dapat memberikan *call center* apabila nantinya ada informasi tambahan dapat dihubungi melalui *call center* khusus.

4. Ketepatan lingkungan

Melakukan koordinasi rutin dengan OPD OPD lainnya setelah menjalankan program di setiap kecamatan, apabila dibutuhkan juga membentuk *grup Whatsapp* dengan perangkat OPD per kecamatan.

5. Ketepatan Proses

Pembebasan biaya Pendidikan serta pemberian bantuan yang berkelanjutan bagi penerima program agar semakin mempermudah bagi target yang ingin kembali ke sekolah.

Untuk mengatasi faktor penghambat pada implementasi kebijakan maka peneliti memberikan saran:

1. Pembentukan SOP khusus selain berpedoman dengan Perbup No. 20 Tahun 2023 agar memiliki pedoman yang lebih rinci yang didalamnya terdapat penjelasan teknis teknis yang tidak dijelaskan di Perbup seperti teknis koordinasi, teknis pelaksanaan setiap tahap implementasi, timeline pengerjaan serta teknis pengisian SIPBM dan lainnya.

2. Melakukan keseragaman pemahaman terhadap program serta rutin melakukan koordinasi dengan aktor lain agar mereka saling tau bagaimana perkembangan program.
3. Pemberian insentif yang sesuai bagi implementator kebijakan dari Dinas Pendidikan sehingga dapat menunjang kinerja dari implementator serta untuk mengatasi kekurangan personil yang turun lapangan dapat dilakukan dengan pemberian tambahan personil khususnya dari Dinas Pendidikan agar tidak bergantung pada tenaga tambahan Forum Anak Beasiswa.
4. Penambahan sarana prasarana sekolah inklusi satu kecamatan terdapat satu sekolah inklusi atau sekolah khusus bagi penyandang disabilitas agar terjadi pemerataan selain itu pemerataan tenaga pendidik khusus bagi sekolah inklusi satu sekolah minimal satu guru khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.
5. Pengawasan khusus dan berlanjut terhadap korban *bullying* yang kembali ke sekolah inklusi, dan adanya komitmen dari Dinas Pendidikan dengan sekolah inklusi

Daftar Pustaka

- , S., Safrida, N., & Muhammad, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2). <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.6027>
- Andersen, J. E. (1975). *Public Policy Making*. Praeger.
- Andersen, J. E. (1984). *Public Policy-Making* (ed. 3). Holt, Rinehart and Winston.
- Barmawi, W., & Suranto, S. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Ternate. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0055>
- Bashori, B., & Aprima, S. G. (2019). Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Lampung. *Produ: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3324>
- Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar. *Jurnal Supremasi*, 7(1). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>
- Lidda, M. A. A., Tajuddin, M. S., & Irfan, I. (2022). Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malunda (Smpn4 Malunda) Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.35329/mitzal.v7i1.2>

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja. Rosdakarya.
- Nurfadlilah, E. (2017). Tata Kelola Pendidikan: Studi tentang Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Ddilihat dari Perspektif Good Governance dan Sound Governance. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–13.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik* (Cetakan 6). Alfabeta.
- Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. (2019). Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2).
- Putri, Alfina, & Mus, S. (2021). Implementasi Program Pendidikan Inklusi Di Sd Negeri Unggulan. *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, 2(2).
<https://doi.org/10.26858/jak2p.v2i2.13474>
- Putri, Annisa, Jayanti, J., & Fakhrudin, A. (2022). Analisis Implementasi Program Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sdlb Negeri Prabumulih. *Js (Jurnal Sekolah)*, 6(2).
<https://doi.org/10.24114/js.v6i2.33373>
- Rahman, A., Mawar, M., Wahyuning Dyas Tuti, R., Handayani, N., & Sahrul, M. (2021). Key Determinants of Elementary School Education Policy Implementation in Border Region. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(1).
<https://doi.org/10.26858/jiap.v11i1.20585>
- ROLOS, M. C., POSUMAH, J., & ... (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa In ... *ADMINISTRASI PUBLIK*.
- S., G., & Monalisa. (2022). Pengaruh Kebijakan Pemberian Insentif Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2).
[https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1\(2\).9312](https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(2).9312)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* / Sugiyono. Alfabeta.
- Zurqoni, Retnawati, H., Arlinwibowo, J., & Apino, E. (2018). Strategy and implementation of character education in senior high schools and vocational high schools. *Journal of Social Studies Education Research*, 9(3).
<https://doi.org/10.17499/jsr.01008>